



Kerja Pemerintah Kerja Bersama

PUTUSSIBAU - Kerja pemerintah merupakan kerja bersama dan bukan sendiri-sendiri, sehingga membutuhkan komitmen. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu Antonius L Ain Pameru, saat membuka Rapat Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Senin (14/5), di Gedung DPRD setempat.

"Maka kita harus kerja ekstra, saya kira tidak kesulitan kalau kita punya komitmen. Kerja pemerintahan ini kerja bersama, bukan sendiri. Maka setiap kriteria itu harus kita penuhi, sehingga bisa mendapat predikat terbaik," ujar Wabup.

Anton, sapaan karibnya mengugah, saat ini mereka sudah tidak bisa bersantai lagi. Apalagi, dia menambahkan, semua sistem kinerja pemerintahan sudah dilakukan secara terbuka, menggunakan informasi teknologi. Dia mencontohkan mengenai sistem *e-planning*



MUSTA'AN/PONTIANAK POST

ARAHAN: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pameru saat memberikan arahannya dalam pertemuan optimalisasi penyelenggaraan SAKIP di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (14/5).

dan *e-budgeting*.

"Sehingga kita tidak ada lagi kebingungan dalam hal menyelenggarakan program kegiatan. Untuk itu kita harus yakin bahwa kita bisa melakukannya," ucap Wabup.

Lebih lanjut Wabup menjelaskan, SAKIP tujuannya jelas, di antaranya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maka, ditegaskan dia bahwa setiap indikator kinerja harus lebih maksimal, sehingga bisa

terpenuhi.

"Saya mohon kita berkomitmen, apapun masalah tetap kita hadapi. Kalau barang itu bisa kita kerjakan, kenapa tidak dilaksanakannya? Karena Kapuas Hulu juga tidak tertinggal jauh dengan daerah lain," gugah Wabup.

Kegiatan ini sendiri digelar dalam rangka meningkatkan komitmen bersama untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kapuas Hulu. Diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, kegiatan tersebut dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kapuas Hulu.

Dalam arahannya, Wabup menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintah terus memberikan penilaian kepada daerah. Menurut dia, bukan hanya SAKIP dari Menpan-RB, tetapi beberapa penilaian lainnya seperti WTP pengelolaan keuangan dari BPK, serta predikat bintang dari Kemendagri.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kapuas Hulu, Edi Suparman menegaskan, tujuan pertemuan tersebut untuk membangun komitmen bersama antar-OPD, dalam meningkatkan kualitas kinerja. Dijelaskan Edi, keluarnya penilaian SAKIP dari Kemenpan-RB tersebut, setelah melalui proses evaluasi. Setelah itu, dia menambahkan, Menpan-RB memberikannya secara nasional, yang kemudian predikat tersebut diumumkan.

"Harapannya agar kepala OPD serius membantu kita dalam membangun komitmen ini, sekarang bukan hanya *output* yang kita harapkan, tetapi *outcome*-nya," ucap Edi.

Di kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu Sarbani mengungkapkan, untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah memang memerlukan komitmen bersama. (aan)